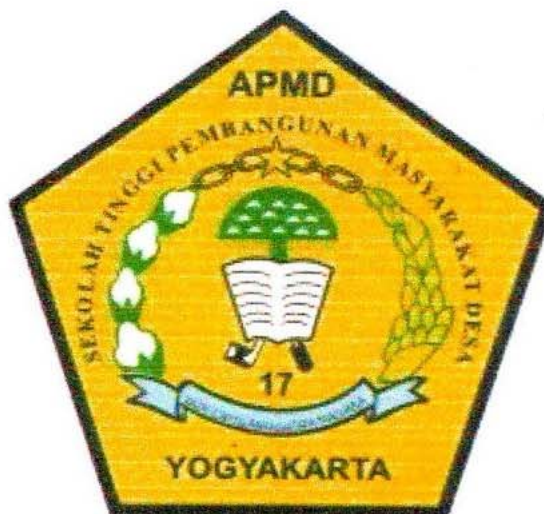


**PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**
*(Penelitian Deskriptif Kualitatif Di Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari,
Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta)*

SKRIPSI



Oleh:

EVARISTUS ENGGO
NIM 13520079

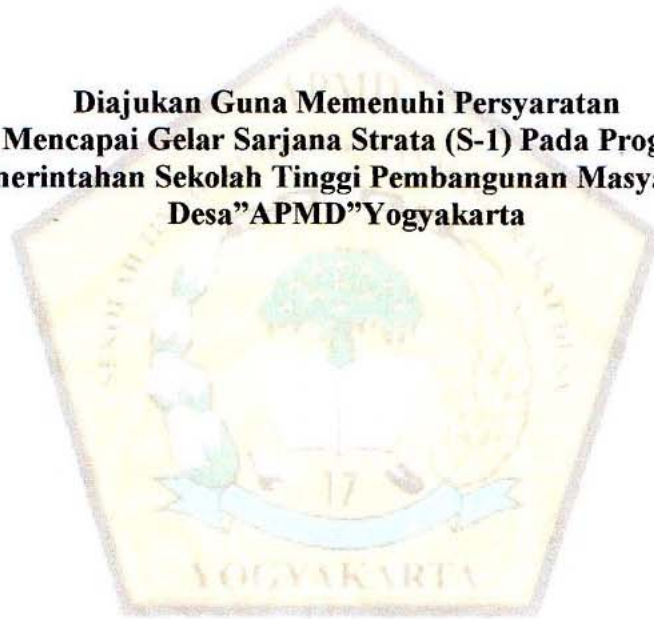
**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**



**PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**
*(Penelitian Deskriptif Kualitatif Di Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari,
Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta)*

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Strata (S-1) Pada Program Ilmu
Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat
Desa "APMD" Yogyakarta**



Oleh:

EVARISTUS ENGGO
NIM 13520079

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan di depan Tim Penguji Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Hari : Jum’at

Tanggal : 31 Maret 2017

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

1. Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si.

Pembimbing

2. Ir. Muhammad Barori, M.Si.

Penguji I

3. Drs. YB. Widyo Hari Murdianto, M.Si.

Penguji II



[Handwritten signatures of the examiners]



Mengetahui

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan

[Handwritten signature]
Gregorius Sahan, S.IP., M.A.

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2017

HALAMAN MOTTO

"Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah." (Thomas Alva Edison)

"Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok adalah harapan"

Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu." - 1 Petrus 5:7

"Jadilah seperti karang di lautan yang tetap kokoh diterjang ombak, walaupun demikian air laut tetap masuk kedalam pori-porinya"

"Hal yang paling menyakitkan di dunia ini adalah Ketika kita tidak bisa membahagiakan orang yang kita sayangi"

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh ungkapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan karunianya, saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini saya ingin mempersembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua orangtua saya (Bapak Yohanes Warung dan Ibu Maria Min Sunarti). Terima kasih atas segala doa dan dukungannya selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
2. Adek-adekku tercinta (Ica, Efat, Alfin, Mely) yang selalu memberikan semangat buat saya. Kalian jangan lupa semangat belajarnya.
3. Semua keluargaku tercinta yang selalu memberikan semangat, doa dan dukungannya selama ini.
4. Saudara/i-ku yang ada di Yogyakarta maupun diluar Yogyakarta yang tidak bisa disebut satu per satu, terima kasih buat kalian semua yang selalu mendukung dan memberikan semangat untuk saya. Sukses selalu untuk kalian semua.
5. Teman-teman UKM MUSIK GANESHA yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungannya selama ini, kalian luar biasa, sukses selalu untuk UKM Musik juga kalian semua, juga untuk abang-abangku di UKM Musik Ganesha, terima kasih banyak.
6. Almamater Tercinta Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA BANJAREJO, KECAMATAN TANJUNGSARI, KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA" dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Strata (S-1) Pada Program Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Pada kesempatan ini penulis ingin memberikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu sehingga terselesaikannya tulisan ini.

1. Bapak Habib Muhsin, S.Sos, M.Si. selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.
2. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP, M.A. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta
3. Ibu Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si. selaku pembimbing yang telah banyak memberikan masukan, motivasi dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
4. Seluruh Staf Pengajar Jurusan Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" Yogyakarta.
5. Kedua Orangtua dan semua Keluarga yang telah memberikan doa dan dukungan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah membantu proses penelitian skripsi ini.
7. Pemerintah Daerah GunungKidul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah membantu proses penelitian skripsi ini.
8. Pemerintah Desa Banjarejo dan Masyarakat yang telah membantu penulis selama masa penelitian.
9. Teman-Teman anggota juga abang-abang alumni UKM Musik Ganesha yang selalu memberikan semangat, motivasi, dukungan juga ilmu, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
10. Almamater tercinta, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Penulis Menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua.

Yogyakarta, 7 April 2017

Penulis

Evaristus Enggo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN	xi
INTISARI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual	8
1. Partisipasi Masyarakat	8
a. Pengertian Partisipasi Masyarakat	8
b. Bentuk Partisipasi Masyarakat	13
c. Tingkat Partisipasi Masyarakat.....	15
d. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat.....	21
2. Perencanaan Pembangunan Desa	25
	vii

a. Pengertian Perencanaan.....	25
b. Perencanaan Pembangunan Desa.....	29
F. Ruang Lingkup	56
G. Metode Penelitian	57
1. Jenis Penelitian	57
2. Unit Analisis	59
3. Teknik Pengumpulan Data	60
4. Teknik Analisis Data	61
BAB II PROFIL DESA BANJAREJO	64
A. Sejarah Desa Banjarejo	64
B. Visi Dan Misi	65
C. Kondisi Geografis	66
D. Kondisi Demografis	68
E. Kondisi sosial ekonomi.....	72
F. Kesenian/Kebudayaan	73
G. Pemerintahan	74
H. Lembaga Kemasyarakatan	75
I. Sarana dan Prasarana	77
J. Struktur Organisasi Pemerintah Desa.....	82
BAB III ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES	
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA	118
A. Deskriptif Narasumber	118

B. Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Di Desa Banjarejo	125
1. Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Di Desa Banjarejo	126
a) Partisipasi masyarakat dalam persiapan sosial dan desain kajian	126
b) Partisipasi masyarakat dalam tahap identifikasi kondisi umum desa.....	131
c) Partisipasi masyarakat dalam tahap analisis aset.....	134
d) Partisipasi masyarakat dalam refleksi,kajian mendalam dan pleno	135
e) Partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan desa	138
2. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Rencana Kerja Pembangunan Desa Di Desa Banjarejo	141
a) Tahap Persiapan.....	141
b) Tahap Pelaksanaan	143
c) Musyawarah perencanaan pembangunan.....	146
BAB IV PENUTUP	149
A. Kesimpulan	149
B. Saran	151

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas wilayah	67
Tabel 2.1	Jumlah Kepala Keluarga di setiap padukuhan	68
Tabel 2.2	Jumlah penduduk Desa Banjarejo berdasarkan Jenis kelamin....	70
Tabel 2.3	Jumlah penduduk Desa Banjarejo berdasarkan Tingkat pendidikan.....	71
Tabel 3.1	Jumlah penduduk Desa Banjarejo berdasarkan Jenis pekerjaan .	72
Tabel 4.1	Jumlah RT/RW di setiap padukuhan	74
Tabel 5.1	Jumlah lembaga kemasyarakatan di Desa Banjarejo.....	76
Tabel 6.1	Jumlah dan jenis tempat ibadah di Desa Banjarejo	77
Tabel 6.2	Jumlah dan jenis sarana pendidikan umum.....	78
Tabel 6.3	Jumlah dan jenis sarana kesehatan	79
Tabel 6.4	Jumlah tenaga kesehatan di Desa Banjarejo	80
Tabel 6.5	Jumlah dan jenis sarana olahraga	81
Tabel 11.1	Informan berdasarkan nama, umur, pendidikan, dan pekerjaan/jabatan.....	119
Tabel 11.1.2	Informan berdasarkan kelompok umur	121
Tabel 11.1.3	Informan berdasarkan jenis kelamin.....	122
Tabel 11.1.4	Informan berdasarkan tingkat pendidikan.....	123
Tabel 11.1.5	Informan berdasarkan pekerjaan	124

DAFTAR BAGAN

Bagan 7.1 Struktur Organisasi Desa Banjarejo	82
Bagan 8.1 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa	94
Bagan 9.1 Struktur Organisasi Karang Taruna Desa Banjarejo	98
Bagan 10.1 Struktur Organisasi PKK Desa Banjarejo	116

PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
*(Penelitian Deskriptif Kualitatif Di Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari,
Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta)*

INTISARI

Perencanaan pembangunan dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik sangat diperlukan dalam mewujudkan pembangunan yang adil, merata dan menyeluruh. Untuk mendapatkan hasil pembangunan desa yang baik, tepat waktu, tepat sasaran, berdaya guna, dan berhasil guna, dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, karena masyarakat sebagai salah satu unsur dalam pembangunan. Apalagi dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang mengakomodasi segala kebutuhan desa untuk kemandirian desa melalui partisipasi masyarakat dengan tujuan kemajuan desa khususnya di desa Banjarejo. Sehingga ini yang menjadi latar belakang penulis ingin mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunann desa di Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunung Kidul.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun yang menjadi objek penelitian ini Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Desa, sedangkan subjek penelitiannya adalah kepala desa, sekretaris desa, Badan permusyawaratan desa, RT/RW, LPMD, Kaur Pembangunan, Karang Taruna dan tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, juga dokumentasi

Hasil Penelitian Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah: (1) Kehadiran masyarakat dalam rapat/pertemuan sangat kurang, (2) keaktifan masyarakat dalam forum masih rendah, (3) Adanya sikap pesimis masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan desa, (4) Pengetahuan Masyarakat masih minim, sehingga berpengaruh terhadap pada tingkat partisipasi di desa, (5) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan desa, (6) Kurangnya pendekatan pemerintah desa kepada masyarakat sehingga partisipasi masyarakat sangat kurang, (7) Masyarakat masih mengharap penuh kepada pemerintah desa untuk mengurus segala kebutuhan desanya.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Perencanaan Pembangunan Desa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang merdeka dan memiliki cita-cita, bangsa Indonesia dituntut terus menerus membangun negaranya sebagai usaha untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan cita-cita mulia ini diperlukan cita-cita bersama antara pemerintah dan rakyat dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan, baik materi maupun spiritual. Pelaksanaan pembangunan nasional akan terwujud apabila dapat terwujud situasi dan kondisi yang damai, tertib dalam penyelenggaraan pemerintah baik di pusat, di daerah provinsi, daerah kabupaten/kota maupun sampai tingkat desa/kelurahan.

Penyelenggaraan pemerintah desa menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 diarahkan mampu menggerakkan prakarsa dan partisipasi masyarakat. Tidak hanya itu saja ada beberapa dasar hukum yang mewajibkan setiap desa untuk harus membentuk perencanaan pembangunan seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).

Dalam konsep desentralisasi sendiri terkandung mekanisme perencanaan dari bawah (*bottom up planning*) dalam pembangunan, yang sangat berbeda dengan mekanisme perencanaan dari atas (*top down planning*) dalam sentralisasi. Mekanisme perencanaan terakhir yang elitis ini memang lebih efisien dalam mencapai target-target, tetapi ia umumnya gagal memahami dan bahkan bisa mematikan berbagai aspirasi masyarakat lokal yang sangat beragam (Moeljarto Tjokrowinoto, 1987: 245). Mekanisme ini bahkan tidak mampu menggali potensi sumber daya manusia dalam masyarakat lokal, sebaliknya justru akan menciptakan ketergantungan yang kuat rakyat pada pemerintah.

Sebaliknya, perencanaan dari bawah (desentralisasi) yang menjadi gagasan besar dari model pembangunan yang berpusat pada manusia (rakyat), memberi peran kepada individu bukan sebagai objek, melainkan sebagai aktor

yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Konsekuensinya mekanisme perencanaan yang desentralisasi akan memberi nilai yang sangat tinggi pada inisiatif lokal dan sistem-sistem untuk mengorganisasi diri sendiri melalui satuan-satuan organisasional yang berskala manusiawi dan komunitas-komunitas yang mandiri (David Korten, 1988: 374).

Pembangunan desa menjadi penting mengingat desa merupakan daerah otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri. Dalam pembangunan desa dibutuhkan perencanaan yang efektif agar dapat tercapai hasil yang maksimal. Perencanaan pembangunan desa adalah sebuah langkah awal yang diambil oleh kepala desa beserta pihak-pihak yang berwenang dalam proses pembangunan desa untuk mengelola sumber daya sehingga masyarakat desa bisa menikmati.

Pembangunan memerlukan perencanaan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberikan hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada. Proses perencanaan pembangunan sekarang lebih menekankan pada rencana kerja atau "*working plan*" sebagai proses dari: (1) input yang berupa keuangan, tenaga kerja, fasilitas, dan lainnya; (2) kegiatan/proses; (3) output/outcomes. Proses perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumber daya dan arah pembangunan nasional, sehingga perencanaan bertujuan untuk menyusun hubungan optimal antara

input, proses, dan output/outcomes atau dapat dikatakan sesuai kebutuhan, dinamika reformasi dan pemerintahan yang lebih demokratis atau terbuka, sehingga masyarakatlah yang paling tahu apa yang dibutuhkan (Kodrat Wibowo, 2011: 3). Jadi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sangat penting karena dapat menumbuhkan sikap memiliki dan rasa tanggungjawab masyarakat kepada pembangunan. Untuk membangun kehidupan bernegara dengan tingkat keragaman masyarakat dan karakteristik geografis yang unik, pemerintah telah menyusun sistem perencanaan pembangunan nasional yang terpadu, menyeluruh, sistematis, yang tanggap terhadap perkembangan jaman, yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam pasal 1 dinyatakan bahwa SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah. Undang undang tersebut juga menjelaskan empat(4) tahap proses perencanaan pembangunan yakni: (1) penyusunan rencana (2) penetapan rencana (3) pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan (4) evaluasi perencanaan rencana.

Perencanaan pembangunan dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik sangat diperlukan dalam mewujudkan pembangunan yang adil, merata dan menyeluruh. Untuk mendapatkan hasil perencanaan pembangunan desa yang baik, tepat waktu, tepat sasaran, berdaya guna, dan

berhasil guna, dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam perencann pembangunan, karena masyarakat sebagai salah satu unsur dalam pembangunan, tentunya dapat mengetahui sekaligus memahami apa yang yang ada diwilayahnya. Disamping itu, dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembngunan, pemerintah tekah memberikan kepercayaan kepada masyarakatnya, sehingga mereka dapat merasa ikut bertanggungjawab dan merasa memiliki program pembangunan yang jelas. Perencanaan pembanguna diharapkan dapat menjawab tantangn perubahn tersebut dengan tetap berpijak pada strategi pembangunan berkelanjutan yang didukung dengan konsep pembangunan manusia. Perencanaan pembangunan dengan melibatkan partisipasi masyarakat diharapkan merupakan sutu proses perumusan alternatif atau keputusan yang didasrkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas masyarakat baik yang bersifat fiik(mental spiritual) dalam rangka pencapaian tujuan yang lebih baik khususnya kemajuan pembangunan di Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Itulah sebabnya partisipasi masyarakat dianggap penting, karena memegang peranan yang sangat besar dalam perencanaan pembangunan desa. Tingkat partisipasi masyarakat akan sangat mempengaruhi keberhasilan dari suatu perenanaan pembangunan. Keberhasilan pembangunan sangat tergantung dari sejauhmana partisipasi masyarakat dan pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam tahap perencanaan,

pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. suatu pembangunan sering mengalami kegagalan karena tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Hal ini terjadi karena kegiatan yang dilakukan seringkali menggunakan pendekatan dari atas sehingga keinginan dari masyarakat kurang disalurkan dan berakibat pada partisipasi yang bersifat pasif.

Berdasarkan hasil observasi penulis di Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sangat rendah, masyarakat kurang mengetahui informasi mengenai rencana pembangunan untuk kedepan. Hal tersebut dapat diketahui ketika ada pembangunan yang diadakan oleh desa sendiri, ada beberapa masyarakat yang tidak mengetahui pembangunan yang dijalankan. juga keterlibatan masyarakat dalam rapat yang diadakan oleh pemerintah desa untuk membahas rencana pembangunan untuk 6 tahun kedepan sangat rendah. Peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta karena tempat itu merupakan tempat dimana peneliti pernah melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama hampir dua (2) bulan lamanya. Peneliti sedikit banyak mendapatkan banyak aspirasi dari masyarakat mengenai proses penyelenggaraan pemerintah di desa tersebut.

Beranjak dari masalah inilah, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Desa” di Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanulloh, Naeni. *Demokratisasi Desa*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015
- Bungin, Burhan (Ed). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001
- Eko, Sutoro. *Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta; Forum pengembangan pembaharuan Desa; 2014
- Fadil, Fathurrahman. *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kota Baru Tengah, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume II Edisi 2, Juli-Desember 2013*
- Juliantara, Dadang. *Pembaharuan Kabupten, Arah Realisasi Daerah*, Yogyakarta; Pembaharuan/Pustaka Jogya Mandiri; 2004
- Kessa, Wahyudin. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015
- Kurniawan, Borni. *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015
- Makawimbang, Hernold Ferry. *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa: System Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa*; Jakarta, Liberty, 2016
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT remaja Rosdakarya, 1988
- Sahdan, Gregorius (Ed). *Transformasi Ekonomi Politik Desa*, Yogyakarta; APMD Press, 2005
- Soewignajo. *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-Sumber Pendapatan Desa*. Jakarta Timur; Ghalia Indonesia, 1986
- Santoso Purwo. *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*, Yogyakarta;Pustaka Pelajar, 2003
- Solekhan, Moch. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasisi Partisipasi Masyarakat*: Setara Press, 2014
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV. Alfabeta, Bandung, 2005

Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung; Refika Aditama, 2005

Riyadi dan Bratakusumah. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2004

Cristian Harry, *Studi Tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2013 Di Desa Loa Janan Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara*, 2015, 3 (1) ; 190-210

Tersedia: [http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2015/03/E-jurnal%20\(03-16-15-12-39-14\).pdf](http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2015/03/E-jurnal%20(03-16-15-12-39-14).pdf)

Sumber-Sumber Lain

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri dalam negeri republic Indonesia nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa

Ristanti, Eka sari, *Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode 2011-2014*, Skripsi STPMD"APMD"Yogyakarta, 2015

Binianggelo, Dina, *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa, di Desa Pakis Kabupaten Magelang*, Skripsi STPMD"APMD"Yogyakarta, 2013

Wibowo Kodrat, *Revitalisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*, Jakarta, 2011 (Tersedia http://www.academia.edu/18996299/Revitalisasi_Sistem_Perencanaan_Pembangunan_Nasional)

Ilmi Nurul, *Konsep Partisipasi Masyarakat*, 2013 (Tersedia <http://nurullilm.blogspot.com/>)

<http://tesisdisertasi.blogspot.co.id/2010/09/teori-partisipasi-masyarakat.html>
(diunduh tanggal 10/11/2016, pukul 12.00 wib)

<http://nurullilm.blogspot.co.id/2013/11/konsep-partisipasi-masyarakat.html>
(diunduh tanggal 9/11/2016, pukul 10.30 wib)

<http://pondokedukasidesa.blogspot.co.id/2016/05/perencanaan-pembangunan-desa.html> (diunduh tanggal 20/11/2016, pukul 21.00 wib)